



PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH

Bagus Bowo Laksono [✉] Subowo

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui Oktober 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:
Local Tax; Retribution; The
General Allocation Fund;
Special Allocation
Fund; Local Government
Expenditure

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY. Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2011 dan tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian secara partial menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan daerah untuk menambah pendapatan asli daerah termasuk didalamnya mengoptimalkan hasil pajak daerah, retribusi daerah.

Abstract

The purpose of this research is to find out whether there is influence of local tax, retribution, the general allocation fund and Special Allocation Fund against Local Government Expenditure. The population in this study is the Government district / town in Central Java and Yogyakarta. Central Java province consists of 29 counties and 6 towns while the Yogyakarta special region consists of 4 districts and 1 city. This research used data secondary of Government Budgets-realization regent / city government save an additional Central Java and Yogyakarta 2011 and 2012. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with t test, F test, and the coefficient of determination. Partially variable local tax, DAU, DAK influence significantly to local government expenditure. While retribution did not affect significantly to local government expenditure. For local governments are expected to further optimize the area to add to the original income areas including optimising the results of local tax, retribution.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: laksonobagusbowo@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia memulai babak baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak terjadi reformasi pada tahun 1998 yang membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk dari reformasi adalah perubahan bentuk pemerintahan sentralisasi atau pusat menjadi desentralisasi atau daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD (Suara Merdeka 2012).

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD (Suara Merdeka 2012).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan

operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Agency Theory menyatakan bahwa konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan adanya perbedaan informasi antara *principal* dan *agent*. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Penelitian Lane (2000) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat. Tetapi, dalam kenyataannya *agent* (pemerintah daerah) akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat (*principal*) dalam menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang belanja daerah. Penelitian tersebut yaitu Agustina (2009); Listiorini (2012); Nugraeni (2011); Prakosa (2004); Kusumadewi dan Rahman (2007); Harianto dan Adi (2007).

Pajak daerah mempengaruhi belanja daerah. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Handayani dan Elva (2012) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar.

Retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah sesuai dengan otonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pakpahan (2009) Retribusi

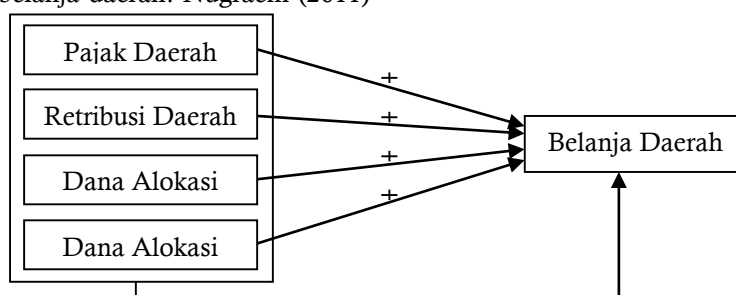
Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) juga mempengaruhi belanja daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Prakosa (2004) membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Simamora (2013) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAK) juga mempengaruhi belanja daerah. Nugraeni (2011)

yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan Listiorini (2012), Handayani dan Elva (2012) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai pengaruh terhadap belanja daerah. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap belanja daerah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

HIPOTESIS

Pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK saling berkaitan sebagai penerimaan daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK yang tinggi akan mengakibatkan belanja daerah yang tinggi pula. Asumsi ini berdasarkan hasil Listiorini (2012) menyatakan bahwa secara simultan *flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Nugraeni (2011) menyatakan bahwa DAU, DAK, dan PAD berasosiasi dengan belanja daerah. Hasil ini membuktikan bahwa DAU, DAK, dan PAD merupakan faktor yang signifikan Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia.

H1 : Pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah di

Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah dan DIY.

Hoover & Sheffrin (1992) dalam Abdulah & Halim (2003) secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pendapatan daerah dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

H2 : Pajak Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*close-list*) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan

dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Retribusi Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Abdullah & Halim 2003). Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : DAU Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terwujud dalam dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : DAK Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah

METODE

Populasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2011 dan 2012.

Variabel Dependen

Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Variabel Independen

Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (<http://www.djpk.depkeu.go.id>). Data

tersebut berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2011 dan 2012 yang memuat pula data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan data realisasi Belanja Daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.19. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai

maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdapat masalah asumsi klasik seperti diatas atau tidak. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini Tabel 1. tentang Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

NO	Variabel Yang Diukur	Indikator	Skala	Kriteria Ukuran	Sumber Data
1.	Belanja Daerah	Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Jawa Tengah dan DIY.	Rasio	Realisasi Belanja Daerah tahun 2011 dan 2012	Sekunder
2.	Pajak Daerah	Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Jawa Tengah dan DIY.	Rasio	Realisasi Pajak Daerah tahun 2011 dan 2012	Sekunder
3.	Retribusi Daerah	Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Jawa Tengah dan DIY.	Rasio	Realisasi Retribusi Daerah tahun 2011 dan 2012	Sekunder
4.	DAU	Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Jawa Tengah dan DIY.	Rasio	Realisasi DAU tahun 2011 dan 2012	Sekunder
5.	DAK	Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Jawa Tengah dan DIY.	Rasio	Realisasi DAK tahun 2011 dan 2012	Sekunder

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	80	458618	2053330	1090967,76	303269,570
Pajak Daerah	80	5854	597520	45842,54	81600,449
Retribusi Daerah	80	5282	84877	25484,36	16820,515
DAU	80	691	1057810	631012,25	188999,461
DAK	80	1762	118902	62448,80	22370,291

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 80 unit, dapat diperoleh hasil untuk belanja daerah tertinggi sebesar Rp 2 Triliun, pajak daerah tertinggi sebesar Rp 597 Milyar, Retribusi tertinggi sebesar Rp 84 Milyar, DAU tertinggi sebesar Rp 1

Triliun, dan DAK tertinggi sebesar Rp 118 Milyar. Belanja daerah terendah sebesar Rp 458 Milyar, pajak daerah terendah sebesar Rp 5 Milyar, retribusi terendah sebesar Rp 5 Milyar, DAU terendah sebesar Rp 691 Juta, dan DAK terendah sebesar Rp 1 Milyar.

Nilai rata-rata dari variabel belanja daerah sebesar Rp 1 Triliun dengan nilai standar deviasi Rp 303 Milyar. Nilai rata-rata dari variabel pajak daerah Rp 45 Milyar sebesar Rp dengan standar deviasi Rp 81 Milyar. Nilai rata-rata dari variabel retribusi daerah sebesar Rp 25 Milyar dengan standar deviasi Rp 16 Milyar. Nilai rata-rata DAU sebesar Rp 631 Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 188 Milyar. Nilai rata-rata DAK sebesar Rp 62 Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 22 Milyar.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak	0,486	2,058	Tidak terjadi multikolinearitas
Retribusi	0,565	1,770	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,435	2,298	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0,431	2,320	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2014

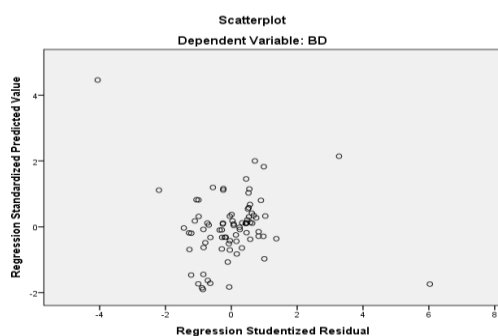
Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk semua variabel independen nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson	Keterangan
2,099	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2014

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,099 terletak antara d_u dan $4-d_u$ yaitu $1,743 < 2,099 < 2,257$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.



Gambar 1. Hasil Uji Scatterplot
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2014

Tabel 3. Uji Kolmogorov-Smirnov

N	Nilai Asymp. Sig.	Keterangan
80	,255	Menyebar normal

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2014

Hasil uji normalitas pada Tabel 3 Uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa residual menyebar normal karena nilai Sig. $0,255 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 Hasil Uji Scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik grafik menyebar diatas dan dibawah garis 0 pada sumbu Y persebarannya secara acak, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh simultan yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen, hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Simultan

Model	df	Mean Square	F	Sig
Regression	4	1,526E12	107,084	.000
Residual	75	4435373945		
Total	79			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Pada Tabel 6 menunjukkan besarnya nilai F hitung adalah 107,084 dinyatakan dengan tanda positif maka arah hubungannya adalah positif. Nilai secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada $\alpha = 0,05$, yaitu sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen artinya variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sehingga H1 dalam penelitian ini **diterima**. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya jumlah pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK secara bersama-sama akan meningkatkan belanja daerah pada pemerintah daerah. Meningkatnya belanja daerah memerlukan perhatian khusus

dalam mengimplementasikan belanja daerah. Perhatian khusus diharapkan dapat mengurangi penggunaan dana belanja daerah yang tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dalam realisasi belanja daerah kadang terdapat perbedaan mencolok antara kebutuhan, pengeluaran dan pendapatan daerah.

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen, hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized t	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	212764,733	50316,973	4,228	,000	
Pajak Daerah	1,562	,238	,420	6,572	,000 Diterima
Retribusi Daerah	1,635	1,069	,091	1,529	,130 Ditolak
DAU	,814	,108	,507	7,509	,000 Dterima
DAK	4,023	,920	,297	4,372	,000 Diterima

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut hasil *output* data yang diolah dengan menggunakan SPSS pada Tabel 7, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$BD = 212764,733 + 1,562 (X_1) + 1,635 (X_2) + 0,814 (X_3) + 4,023 (X_4) + e.$$

Berdasarkan hasil pada Tabel 7 hipotesis kedua **diterima** karena koefisien variabel pajak daerah menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan hipotesis awal yang positif. Kesimpulannya jika terjadi kenaikan pajak daerah pada pemerintah daerah akan menyebabkan kenaikan belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Handayani dan Elva (2012) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar. Sehingga semakin tinggi pajak maka semakin tinggi belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini **ditolak** karena karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Hasil ini mengindikasikan

bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan retribusi daerah rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seharusnya setiap daerah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya baru (ekstensifikasi) yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini **diterima** karena nilai t hitung < t tabel. Hasil ini mengindikasikan bahwa kabupaten/ kota yang mendapatkan DAU besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prakosa (2004), Maimunah (2006), Listiorini (2012), Afrizawati (2012) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula belanja daerah.. Prakosa (2004) membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Efektifitas Belanja Daerah juga perlu diperhatikan, karena bukan rahasia umum lagi setiap akhir tahun anggaran terjadi penghabisan anggaran belanja hal ini menunjukkan bahwa Pemda “menunggu” beberapa alokasi DAU yang diperoleh sebelum menentukan berapa belanja yang akan dihabiskan, seperti yang ditengarai (Simanjuntak dalam *Sidik et al*, 2002).

Hipotesis kelima penelitian ini **diterima** karena nilai t hitung $<$ t tabel. Dari hasil ini dapat disimpulkan terjadi pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Listiorini (2012), Handayani dan Elva (2012) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Handayani dan Elva (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,922 ^a	,851	,843

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 8 menunjukkan besarnya nilai *adjusted R²* 0,843 yang berarti 84,3% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya 15,7% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini berarti kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi dimasing-masing daerah untuk menambah pendapatan asli daerah termasuk didalamnya mengoptimalkan hasil pajak daerah, retribusi daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dan Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah :Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.

Afrizawati. 2012. “Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Volume 2 No. 1. Hal 21-30. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

Agustina, Wiwit, 2009, “Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Tesis Program Pasca Sarjana Megister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.

- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdulah 2006. "Hubungan dan masalah keagenan dipemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)*.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. "Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun". Dalam *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1 No. 1. Hal 1-12 Madiun: IKIP PGRI Madiun.
- Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007
- <http://www.suaramerdeka.com>. Diakses pada 20 februari 2014. pukul 16.25.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arife Rahman. 2007. "Flypaper effect pada dana aloksi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia". Juni 2007, *JAAI* Volume 11 No. 1.
- Lane. (2000). Jilid 1 (*Marketing Management, Twelfth Edition*). Terj. Benyamin Molan. Jakarta, PT.
- Listiorini. 2012. "Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Juli 2012", *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 4 No. 2, YPK Medan.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26 Agustus 2006, Padang.
- Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *Akmenika UPY*, Vol 8 Hal 96-117 Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Pakpahan, Rolan. 2009. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara". *Skripsi*. FE USU. Sumatera Utara.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI* Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- www.djpk.depkeu.go.id.